



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR II TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 nomor 125)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SIAK,


AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 11



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIAK**

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BADAN

KEUANGAN DAN

ASET DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Renstra merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, hambatan, serta peluang yang ada maupun yang mungkin timbul. Penyusunannya dilaksanakan melalui pembahasan bersama bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak periode 2025–2029. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan setiap unit kerja pada tahun anggaran 2025 hingga 2029.

Kami berharap seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat secara konsisten, optimal, dan penuh tanggung jawab melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Semoga Renstra ini memberikan arah yang lebih jelas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun mitra kerja. dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Siak Sri Indrapura, Januari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SIAK



RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si
NIP. 197509222000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.2.2 Isu – Isu Strategis.....	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45

4.1	Uraian Program.....	45
4.2	Uraian Kegiatan	45
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif	46
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU).....	82
BAB V PENUTUP.....		87
LAMPIRAN.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kebutuhan Jabatan di BKAD Kab. Siak	21
Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia BKAD Kab. Siak berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2026	22
Tabel 2.3 Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan di BKAD Kab. Siak tahun 2026.....	23
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Mobilitas BKAD	24
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BKAD Berdasarkan KIB B	24
Tabel 2.6 Data Jaringan Komputer BKAD 2026.....	26
Tabel 2.7 Buku Inventaris BKAD 2026	27
Tabel 2.8 PENGESAHAN APBD KABUPATEN SIAK	28
Tabel 2.9 REALISASI PENYAMPAIAN PELAPORAN	30
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi BKD.....	31
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Kabupaten Siak Tahun 2021-2025	33
Tabel 2.12 Isu – Isu Strategis BKAD	35
Tabel 2.13 Telaahan terhadap Renstra.....	37
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Pelayanan	42
Tabel 3.2 Penetapan Renstra BKAD.....	43
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BKAD.....	43
Tabel 4.1 Program Jangka Menengah Renstra.....	49
Tabel 4.2 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	50
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah.....	62
Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	63
Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas	76
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama	84
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra.....	2
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.....	9
Gambar 2. 2 Bagan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.....	9
Gambar 2. 3 Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS.....	26
Gambar 2. 4 Aplikasi Sofit.....	26
Gambar 2. 5 Apilkasi E-BMD	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2029.

Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Siak dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra



Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Undang-Undang dan peraturan yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terawal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 nomor 125)

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2029 dimaksud sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selama periode lima tahun kedepan. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025– 2029. berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

B. Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah secara terencana, sistematis, dan terukur dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta prioritas pembangunan terutama dalam tata kelola pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
6. Menjadi alat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Siak

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan
Fungsi Pelayanan

2.2.2 Isu – Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan
Pagu Indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Badan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, dan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya

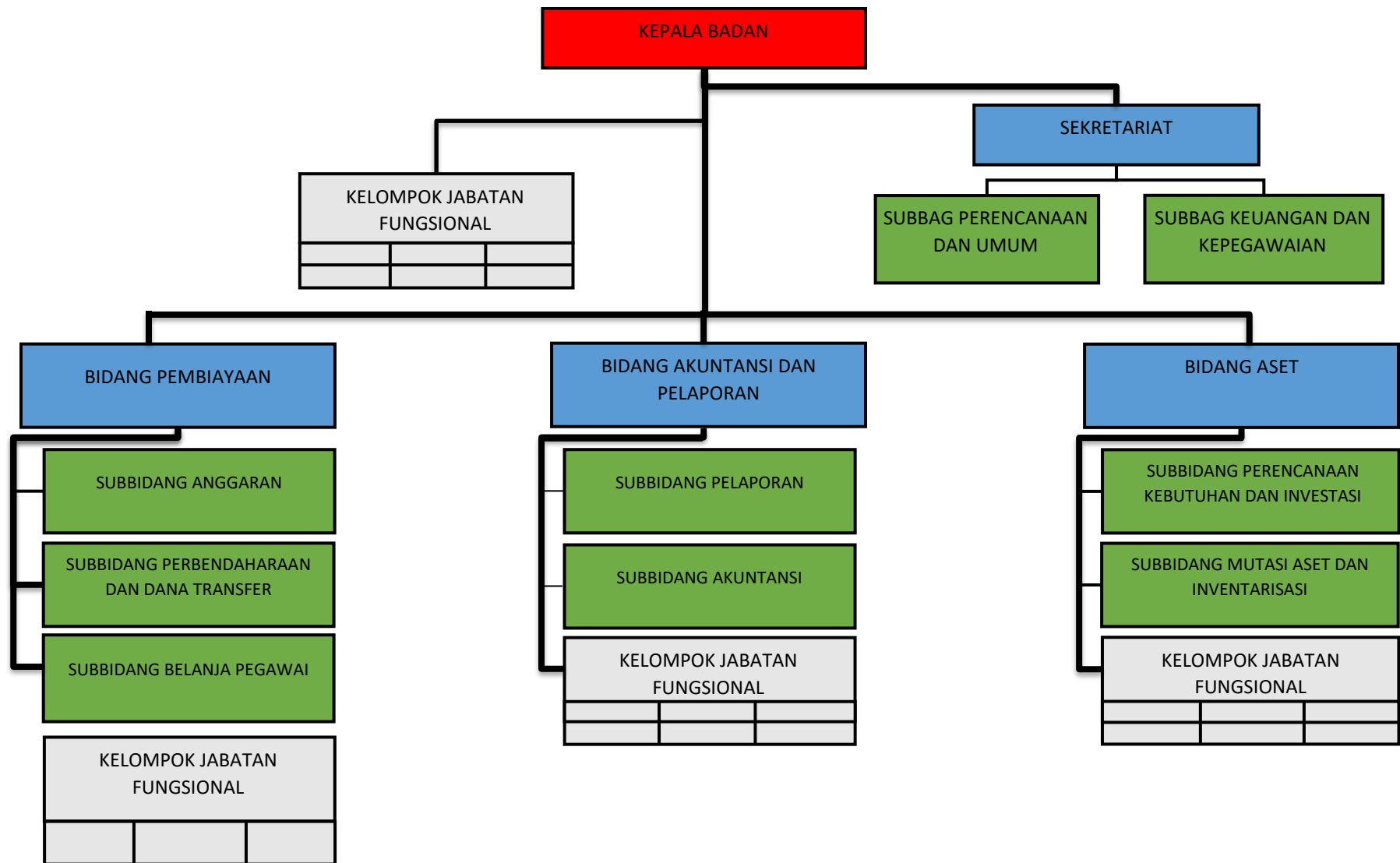
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 125 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Siak sebagai berikut :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Anggaran;
 - b. Subbidang Perbendaharaan dan Dana Transfer ; dan
 - c. Subbidang Belanja Pegawai.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pelaporan ; dan
 - b. Subbidang Akuntansi.
5. Bidang Aset, terdiri dari :
 - a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi; dan
 - b. Subbidang Mutasi Aset dan Inventarisasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut

Gambar 2.1 Bagan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak



Uraian tugas dari masing-masing organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

- A. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- B. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) Subbagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
 - f. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja;
 - g. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian, pemeliharaan arsip;
 - h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - j. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - k. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Umum;
 - l. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - m. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pengelolaan serta pemanfaatan barang milik daerah / aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah ; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. mengevaluasi hasil program kerja;
- m. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- n. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian perkantoran;
- o. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- p. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- q. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan tanda jasa, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Bidang Pembiayaan

- A. Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan.
- B. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten meliputi kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran semester;
 - d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - f. pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembiayaan;
 - h. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penganggaran dan penatausahaan.
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) Subbidang Anggaran, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan KUA/PPAS dan Perubahan KUA/PPAS
- d. menyiapkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan RKPA-Perangkat Daerah, menghimpun dan mengelola usulan anggaran belanja daerah dan pembiayaan, menyusun lampiran Ranperda tentang APBD dan perubahan APBD,
- e. melakukan verifikasi rancangan DPA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah;
- f. menyiapkan dokumen perubahan atau pergeseran anggaran;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Subbidang Perbendaharaan dan Dana Transfer mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja daerah;
- d. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah, yaitu : penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencaran Dana (SP2D) pada belanja;
- e. melaksanakan Sistem Pengeluaran kas daerah, pengeluaran APBD dan Perubahan APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang Pemerintah

Daerah, pemantauan suku bunga bank;

- f. menyiapkan dokumen syarat penyaluran dana transfer ke daerah;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan kas dan belanja daerah, mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melakukan validasi dan pembukuan terhadap penerbitan SP2D dan menyusun laporan realisasi anggaran;
- h. melaksanakan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- j. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Subbidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. menghimpun melaksanakan penginputan data perubahan gaji penerbitan dan penatausahaan data gaji Perangkat Daerah, melaksanakan rekonsiliasi data gaji PNS;
- d. menyiapkan Keputusan kepala daerah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- e. memproses surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;
- f. menghimpun dan memproses potongan fihak ketiga (PFK) atas gaji PNS;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- A. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah serta sistem akuntansi Pemerintah Daerah, mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang yang mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. menyusun rumusan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. penyusunan Laporan bulanan dan triwulan realisasi Pelaksanaan APBD;
 - d. penyusunan Laporan Semester I (Pertama) Realisasi Pelaksanaan APBD dan Prognosis;
 - e. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - f. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - h. pelaksanaan verifikasi, bimbingan dan pendampingan atas pencatatan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) Subbidang akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Subbidang Akuntansi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca LO, LPE, LAK dan catatan atas laporan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Membantu pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. Membantu pelaksanaan bimbingan dan pendampingan atas pencatatan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Subbidang Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Pelaporan mempunyai fungsi

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Subbidang Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. Menyiapkan bahan Laporan Realisasi bulanan, triwulan, semester I (pertama) dan Prognosis Pemerintah Kabupaten Siak;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Aset

- A. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset.
- B. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, yaitu :
 - Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
 - Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan

pengendalian kekayaan daerah evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan.

- d. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang milik daerah, dan merekap rencana kebutuhan barang milik daerah yang terdiri dari RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan dan RKBMD penghapusan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan aset investasi;
- e. membantu pelaksanaan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu;
- f. membantu koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Subbidang Mutasi Aset dan Inventarisasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Subbidang Mutasi Aset dan Inventarisasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- a. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagaimana tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketugasannya
- c. Jumlah dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- d. Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian.

2.1.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Sumber Daya memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Jumlah Sumber Daya Manusia per Januari 2026 adalah sebanyak 101 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Jumlah Kebutuhan Jabatan di BKAD Kab. Siak

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang Pembiayaan	1	-	1
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	1	1
5.	Kepala Bidang Aset	1	-	1
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum	-	1	1
7.	Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian	1	-	1
8.	Kepala Subbidang Anggaran	1	-	1
9.	Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Dana Transfer	1	-	1

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

10	Kepala Subbidang Belanja Pegawai	1	-	1
11	Kepala Subbidang Pelaporan	1	-	1
12	Kepala Subbidang Akuntansi	-	1	1
13	Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi	1	-	1
14	Kepala Subbidang Mutasi Aset dan Dana Inventarisasi	-	1	1
15	Jabatan Fungsional	4	4	8

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia BKAD Kab. Siak
berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2026**

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Honorir		Jumlah	%
		Perempuan	Laki -Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki		
1.	SMA Sederajat	-	3	3	7	-	-	13	12,75%
2.	D3	2	-	2	3	-	1	8	7,84%
3.	S1	13	22	15	15	3	1	69	67,65%
4.	S2	5	7	-	-	-	-	12	11,76%

Berdasarkan data kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak terdapat 102 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan pendidikan S2 berjumlah 12 Orang, 5 Perempuan dan 7 Laki – Laki, dan S1 berjumlah 69 Orang yaitu 31 Perempuan dan 38 Laki - Laki , Diploma 3 berjumlah 8 orang yaitu 4 Perempuan dan 4 Laki – Laki, SMA Sederajat berjumlah 13 Orang yaitu 3 Perempuan dan 10 Laki – Laki. Selanjutnya Jumlah Sumber Daya Manusia

berdasarkan golongan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Siak tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Sumber Daya Manusia
berdasarkan golongan di BKAD Kab. Siak tahun 2026

NAMA	GOLONGAN	JUMLAH	%
A	PNS		
	I	-	0%
	II	2	3,77%
	III	44	83,02%
	IV	7	13,21%
JUMLAH		53	
B	PPPK		
	V	5	55,56%
	VII	1	11,11%
	IX	3	33,33%
JUMLAH		9	

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, Jumlah Sumber Daya Manusia yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 44 Orang, diikuti Golongan IV dengan jumlah 7 Orang, Golongan II sebanyak 2 Orang dan PPPK dengan golongan V sebanyak 5 orang, golongan IX sebanyak 3 orang dan golongan VII sebanyak 1 orang.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Terdapat 67 unit peralatan dan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana mobilitas dengan rincian disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Mobilitas BKAD

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	62
	Jumlah	91

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BKAD Berdasarkan KIB B

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
2	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
3	ALAT UKUR UNIVERSAL	13
4	ALAT UKUR LAIN-LAIN	1
5	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	19
6	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	8
7	MESIN KETIK	13
8	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1
9	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	5
10	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	547
11	ALAT KANTOR LAINNYA	351
12	MEUBELAIR	629
13	ALAT PENGUKUR WAKTU	8
14	ALAT PEMBERSIH	5
15	ALAT PENDINGIN	123
16	ALAT DAPUR	5
17	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	368
18	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	23
19	MEJA KERJA PEJABAT	6
20	MEJA RAPAT PEJABAT	2
21	KURSI KERJA PEJABAT	28
22	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	11

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

23	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	11
24	PERALATAN STUDIO AUDIO	2
25	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	6
26	PERALATAN CETAK	1
27	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2
28	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	28
29	ALAT-ALAT SANDI	1
30	ALAT LABORATORIUM UMUM	1
31	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	4
32	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
33	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	1
34	NON SENJATA API	15
35	KOMPUTER JARINGAN	14
36	PERSONAL KOMPUTER	275
37	PERALATAN MAINFRAME	8
38	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
39	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	246
40	PERALATAN JARINGAN	36
41	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	6
43	BANGUNAN GUDANG	6
42	BANGUNAN FASILITAS UMUM	6
43	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1
44	BUKU UMUM	44
45	BUKU FILSAFAT	2
46	BUKU AGAMA	16
47	BUKU ILMU SOSIAL	7
48	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	11
49	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	1
50	SERIAL	9

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan dan aset daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain:

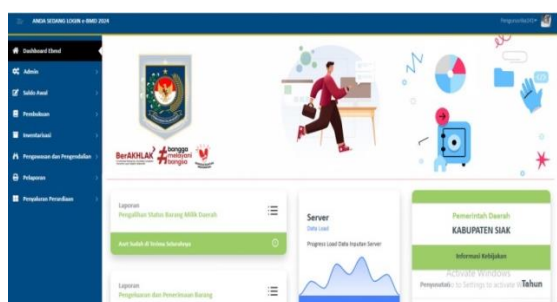
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak



Gambar 2. 3 Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS



Gambar 2. 4 Aplikasi Sofit



Gambar 2. 5 Aplikasi E-BMD

Terlaksananya berbagai SIM tersebut diperlukan jaringan yang terdapat pada BKAD per Januari 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Data Jaringan Komputer BKAD 2026

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	Peralatan jaringan komputer Sistem Informasi Gaji PNS	1
2.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi Sofit	1
3.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi E – BMD	1
	Jumlah	3

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pengguna barang milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan BI per 31 Januari 2026 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.7 Buku Inventaris BKAD 2026

NO	URAIAN	JUMLAH
1	KIB A TANAH	6,761,916,000.00
2	KIB B PERALATAN DAN MESIN	30,129,189,547.68
3	KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN	18,945,244,157.43
4	KIB D JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
5	KIB E ASET TETAP LAINNYA	19,824,126.66
6	KIB F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	100,131,570.64
	JUMLAH	55,956,305,402.42
	ASET LAINNYA	2,754,131,907.26
	TOTAL	58,710,437,309.68

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah Kabupaten Siak. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok serta fungsi yang ditangani adalah pada sektor pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada

DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Capaian kinerja terhadap indikator Sasaran Strategis **"Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak"** dari tahun 2021 s/d 2025 yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari tercapainya kinerja penganggaran yang ditandai dengan pengesahan APBD tepat waktu dari tahun 2021 s/d 2025 sebagaimana terdapat pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8 PENGESAHAN APBD KABUPATEN SIAK

No	TAHUN	NOMOR/TANGGAL PERDA APBD	NOMOR/TANGGAL PERBUP PENJABARAN APBD
1	2021	9 TAHUN 2020/30 DESEMBER 2020	130 TAHUN 2020/30 DESEMBER 2020
2	2022	6 TAHUN 2021/28 DESEMBER 2021	91 TAHUN 2021/28 DESEMBER 2021
3	2023	11 TAHUN 2022/28 DESEMBER 2022	115 TAHUN 2022/28 DESEMBER 2022
4	2024	8 TAHUN 2023/29 DESEMBER 2023	125 TAHUN 2023/29 DESEMBER 2023
5	2025	5 TAHUN 2024/31 DESEMBER 2024	150 TAHUN 2024/31 DESEMBER 2024

B. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan Anggaran Kas masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

C. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya

berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Siak yakni Bank Riau Kepri Syariah Cabang Siak. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalikan tugas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang penganggaran dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset daerah. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian dan sensus aset untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik

negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka:

1. Penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun;
2. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pengadaan barang daerah.

Disamping itu penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja Sasaran Strategis "**Opini BPK RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak**" yang didalamnya terdapat pelaporan aset daerah yang menjadi salah satu komponen utama. untuk mengetahui waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.9 REALISASI PENYAMPAIAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

NO	TAHUN	TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
1	2021	15 Maret 2022
2	2022	10 Maret 2023
3	2023	27 Maret 2024
4	2024	27 Maret 2025
5	2025	31 Maret 2026

Berikut dapat dijabarkan dalam tabel capaian kinerja Badan Keuangan Daerah periode 2021-2025 :

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi BKD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Ratio Capaian pada Tahun -				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
2.	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	100	100	100	100	100

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selama periode 2021-2025 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.11 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang- undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa- apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang, dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bimtek baik formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang relatif tinggi.

**Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD
Kabupaten Siak Tahun 2021-2025**

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	37,122,811,065.00	39,660,415,087.00	45,480,499,508	48,717,367,646	39,044,419,146	33,256,305,410.00	35,219,957,005.00	40,561,794,692	39,969,570,108	30,713,167,625	89.58%	88.80%	89.19%	82.04%	78.66%	42,005,102,490.40	35,944,158,968.00
Belanja Modal	485,238,100.00	1,772,161,400.00	4,288,868,814	4,693,323,484	1,377,642,410	358,398,340.00	1,630,310,930.00	4,169,442,304	3,190,907,306	1,321,392,410	73.86%	92.00%	97.22%	67.99%	95.92%	2,523,446,841.60	2,134,090,258.00
Belanja tidak Terduga	21,192,164,183.00	12,329,074,900.00	7,455,629,938	5,549,814,995	1,497,300,000	10,968,635,084.00	860,396,150.00	1,184,837,450	525,722,650	337,000,000	51.76%	6.98%	15.89%	9.47%	22.51%	9,604,796,803.20	2,775,318,266.80
Belanja Transfer	245,426,556,000.00	243,685,471,800	265,619,037,590	278,960,993,300	283,842,383,000.00	227,948,130,000.00	243,630,771,800.00	265,581,637,590	272,873,211,570	249,645,797,950	92.88%	99.98%	99.99%	97.82%	87.95%	263,506,888,338.00	251,935,909,782.00
Jumlah	304,226,769,348.00	297,447,123,187.00	322,844,035,850.00	337,921,499,425.00	325,761,744,556.00	272,531,468,834.00	281,341,435,885.00	311,497,712,036.00	316,559,411,634.00	282,017,357,985.00	89.58%	94.59%	96.49%	93.68%	86.57%	317,640,234,473.20	292,789,477,274.80

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Kabupaten Siak merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan. Kelompok Sasaran Layanan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Siak dan Pemangku Kepentingan terkait.

Pelayanan yang diberikan Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa pelayanan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perbendaharaan seperti Pemrosesan SPM menjadi SP2D, Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi ASN Kabupaten Siak, Pelayanan Penyusunan Anggaran seperti RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan seperti Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, serta Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Keuangan dan Aset Daerah beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021 - 2025 sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dari permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi pada periode berikutnya, dari analisis tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.12 Isu – Isu Strategis BKAD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU YANG RELEVAN	ISU DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurang cermatnya OPD menyusun RKA dan anggaran kas sehingga sering terjadi usulan perubahan atau pergeseran anggaran kas yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan di OPD	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Berjalan Secara Optimal	Ketidakpastian perekonomian global akibat dari perang dagang	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (<i>trouble</i>).	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (<i>trouble</i>).	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu
	SDM pengelola keuangan di OPD belum seluruhnya memahami terhadap mekanisme perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan			Sistem E-BMD yang sampai saat ini belum berfungsi secara optimal		Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	Belanja modal yang disusun pada APBD Murni oleh OPD masih banyak dilakukan penyerapan pada akhir tahun					Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

	Masih banyak OPD yang melakukan realisasi anggaran belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan tetapi tetap direalisasikan					Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat Koordinasi.
	Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan PPTK, PPK SKPD, PPK, dan perencana terhadap realisasi Belanja					Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan
	Masih adanya kesalahan penganggaran barang habis pakai atau belanja pemeliharaan namun dianggarkan di Belanja modal					Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu
	SDM pengurus barang di OPD belum seluruhnya kompeten sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan rekonsiliasi barang	Belum dapat mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah yang baik				Penerbitan SP2D tepat waktu
	Masih banyak Tanah daerah yang belum bersertifikat					
	Penggunaan dan Penataan BMD belum optimal					

Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, juga dapat digambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di

Kabupaten Siak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset di daerah. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan teknologi informasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah bagi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengelolaan dan pelaporan BMD yang sering terkendala dan terlambat sebagai salah satu data/dokumen utama dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu.

Selanjutnya akan dilakukan telaahan terhadap Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau dan Kementerian Keuangan RI dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak untuk melihat keterkaitan dan keselarasan dari masing-masing Renstra tersebut agar sinergi bisa tercapai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Keselarasan dari Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Telaahan terhadap Renstra

No.	Indikator Kinerja	Sasaran RENSTRA BKAD Kabupaten Siak	Sasaran pada RENSTRA BPKAD Provinsi Riau	Sasaran pada RENSTRA Kementerian Keuangan
1	Opini BPK RI	1. Meningkatnya tata kelola anggaran 2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan

		4. Meningkatnya tata kelola asset daerah		
--	--	--	--	--

Dari komparasi capaian sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, BPKAD Provinsi Riau dengan Kementerian Keuangan dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan jika opini BPK atas laporan keuangan tersebut bisa terus menerus dipertahankan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.2 Isu – Isu Strategis

Isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu

Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan laporan keuangan merupakan isu strategis yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Keterlambatan dapat berdampak pada tertundanya pelayanan publik, rendahnya serapan anggaran, serta berkurangnya kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, koordinasi lintas perangkat daerah, serta disiplin terhadap jadwal yang telah ditetapkan

2. Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan Prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Predikat WTP mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Mempertahankan capaian tersebut menjadi isu strategis karena menuntut

konsistensi dalam penerapan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut yang efektif atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Peningkatan Penilaian MCP KPK Terhadap Pengelolaan BMD

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Isu strategis ini muncul karena pengelolaan BMD masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pengamanan aset. Peningkatan nilai MCP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola aset secara transparan dan akuntabel.

4. Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis dan rapat Koordinasi.

Kompetensi pejabat pengelola keuangan merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Isu strategis ini berkaitan dengan perlunya peningkatan pemahaman dan keterampilan SDM dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis dan rapat koordinasi yang terarah.

5. Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan

Pengurus barang memiliki peran strategis dalam menjamin tertib administrasi dan pengamanan BMD. Isu ini muncul karena masih ditemukannya permasalahan dalam pencatatan, pelaporan, dan pemutakhiran data aset. Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara berkelanjutan diperlukan agar pengelolaan BMD dapat dilakukan secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu

Rekonsiliasi BMD secara berkala merupakan langkah penting untuk menjamin kesesuaian data aset antara pengelola dan pengguna barang. Isu strategis ini berkaitan dengan upaya meminimalisasi selisih data, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta mendukung pencapaian opini WTP. Ketepatan waktu rekonsiliasi menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antar perangkat daerah.

7. Penerbitan SP2D tepat waktu.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tepat waktu merupakan indikator kualitas pelayanan pengelolaan kas daerah. Isu strategis ini berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran oleh perangkat daerah. Keterlambatan penerbitan SP2D dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program dan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan sistem dan prosedur yang efektif serta dukungan SDM yang kompeten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode 5 tahun (tahun 2025-2029) pada bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu:

“TERWUJUDNYA SIAK HEBAT, BERMARTABAT, BERKARAKTER BUDAYA MELAYU, DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKOLOGI”

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 (Enam) misi serta ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Siak. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah Misi Ke 6 (Enam) yaitu:

“MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN MENDORONG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS DAN HUMANIS”

Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut :

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)	80,30	80,50	80,80	81,00	81,50	81,80	82,00	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	41,77	41,77	23,11	40	40	40	40	
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30,53	30,53	38,00	38,72	38,90	39,16	39,37	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	38	38	-6	-5	-7	-9	-10	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	58,63	58,63	55	56	57	58	59	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00	30,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)	80,30	80,50	80,75	81	81,50	81,75	82,00	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan maka untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra BKAD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemantapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Perwujudan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Mempertahankan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran lewat strategi maka kebijakan yang diambil untuk mewujudkan semua itu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BKAD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN BKAD	KET.
1	Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik	Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Daerah 3. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Daerah 4. Peningkatan Kualitas Transparansi Pengelola Keuangan Daerah 5. Penerapan SIPD secara Komprehensif 6. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Keuangan Daerah	

2		Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Daerah 2. Peningkatan Kualitas Transparansi Pengelola Keuangan Daerah 3. Penerapan SIPD secara Komprehensif 4. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Keuangan Daerah	
3.		Meningkatkan Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penerapan E-BMD 2. Penyelesaian Permasalahan BMD pada proses Litigasi dan non Litigasi 3. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Barang Milik Daerah	
4.		Meningkatkan Predikat SAKIP	1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran hasil kerja aparatur. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan. 3. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak untuk periode 2025 - 2029, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai. Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel (lampiran I) Kegiatan / Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan/Material
12. Fasilitas Kunjungan Tamu
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pengadaan Mebel
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28. Pemeliharaan Mebel
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
35. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
36. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
37. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
38. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
39. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
40. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
41. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
42. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
43. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
44. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
45. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

46. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 47. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 48. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 49. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 50. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah
 51. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 52. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota
 53. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten Kota
 54. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 55. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 56. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 57. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
 58. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 59. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 60. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 61. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 62. Pengamanan Barang Milik Daerah
 63. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 64. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 65. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat secara lengkap pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Program Jangka Menengah Renstra

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					292.713.228.530,65		302.347.647.775,26		313.094.006.390,19		325.493.606.391,58		335.694.136.093,36	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.025.833.804,65		19.567.338.054,70		20.125.626.711,45		20.700.786.255,50		21.293.237.639,81	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKAD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	19.025.833.804,65	100	19.567.338.054,70	100	20.125.626.711,45	100	20.700.786.255,50	100	21.293.237.639,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					273.124.522.851,00		282.201.418.512,00		292.372.972.704,00		304.180.396.430,00		313.770.947.181,00	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	41,77	41,77	23,11	490.485.000,00	40,00	501.428.700,00	40,00	512.639.572,00	40,00	520.427.420,00	40,00	604.900.106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30,53	30,53	38,45		38,72		38,90		39,16		39,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-96,61	38,00	-6,00	272.146.797.151,00	-5,00	281.203.004.298,00	-7,00	291.353.407.908,00	-9,00	303.142.905.282,00	-10,00	312.638.642.072,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	58,63	58,63	55,00		56,00		57,00		58,00		59,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	487.240.700,00	100	496.985.514,00	100	506.925.224,00	100	517.063.728,00	100	527.405.003,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					562.871.875,00		578.891.208,56		595.406.974,74		612.423.706,08		629.951.272,55	
Meningkatnya Tata Kelola Aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	20,00	20,00	10,00	562.871.875,00	10,00	578.891.208,56	10,00	595.406.974,74	25,00	612.423.706,08	30,00	629.951.272,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					292713228530.65		302347647775.26		313094006390.19		325493606391.58		335694136093.36	

Tabel 4.2 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)		
					Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)		
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaa Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0011 - Pengadaa Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	41,77	41,77	23,11	40,00	40,00	40,00	40,00	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	30,53	30,53	38,45	38,72	38,90	39,16	39,37	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	58,63	58,63	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	-96,61	38,00	-6,00	-5,00	-7,00	-9,00	-10,00	
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00	30,00	

Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				292.713.228.530,65		302.347.647.775,26		313.094.006.390,19		325.493.606.391,58		335.694.136.093,36		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.025.833.804,65		19.567.338.054,70		20.125.626.711,45		20.700.786.255,50		21.293.237.639,81		
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKAD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	19.025.833.804,65	100	19.567.338.054,70	100	20.125.626.711,45	100	20.700.786.255,50	100	21.293.237.639,81	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.027.455.551,65		13.857.052.277,92		14.309.143.939,13		14.772.110.520,37		15.388.091.518,36		
Tersedianya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	108	96	14.027.455.551,65	96	13.857.052.277,92	98	14.309.143.939,13	100	14.772.110.520,37	100	15.388.091.518,36		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.027.455.551,65		13.857.052.277,92		14.309.143.939,13		14.772.110.520,37		15.388.091.518,36		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	108	96	14.027.455.551,65	96	13.857.052.277,92	98	14.309.143.939,13	100	14.772.110.520,37	100	15.388.091.518,36		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		70.200.000,00		72.053.280,00		72.557.652,96		0,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	117	70.200.000,00	117	72.053.280,00	117	72.557.652,96	0	0,00		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		70.200.000,00		72.053.280,00		72.557.652,96		0,00		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	117	70.200.000,00	117	72.053.280,00	117	72.557.652,96	0	0,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.476.479.400,00		1.533.732.808,22		1.564.407.464,39		1.595.695.613,68		1.627.609.525,91		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	1.476.479.400,00	6	1.533.732.808,22	6	1.564.407.464,39	6	1.595.695.613,68	6	1.627.609.525,91		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	67	67		67		67		67		67			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	842	500		500		600		600		600			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3		3		3		3		3			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.186.000,00		35.085.091,80		35.786.793,64		36.502.529,51		37.232.580,10		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	34.186.000,00	6	35.085.091,80	6	35.786.793,64	6	36.502.529,51	6	37.232.580,10		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.789.000,00		31.404.780,00		32.032.875,60		32.673.533,11		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	30.000.000,00	2	30.789.000,00	2	31.404.780,00	2	32.032.875,60	2	32.673.533,11		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	30.000.000,00	3	50.000.000,00	3	51.000.000,00	3	52.020.000,00	3	53.060.400,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				452.953.400,00		464.866.074,42		474.163.395,91		483.646.663,83		493.319.597,10		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	67	67	452.953.400,00	67	464.866.074,42	67	474.163.395,91	67	483.646.663,83	67	493.319.597,10		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				89.845.000,00		92.207.923,50		94.052.081,97		95.933.123,61		97.851.786,06		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	20	89.845.000,00	20	92.207.923,50	20	94.052.081,97	20	95.933.123,61	20	97.851.786,06		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				30.000.000,00		30.789.000,00		31.404.780,00		32.032.875,60		32.673.533,11		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	12	30.000.000,00	12	30.789.000,00	12	31.404.780,00	12	32.032.875,60	12	32.673.533,11		
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				30.000.000,00		30.789.000,00		31.404.780,00		32.032.875,60		32.673.533,11		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	12	30.000.000,00	12	30.789.000,00	12	31.404.780,00	12	32.032.875,60	12	32.673.533,11		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.600.000,00	30	31.212.000,00	30	31.836.240,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				706.000.000,00		724.567.800,00		739.059.156,00		753.840.339,12		768.917.145,90		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	842	500	706.000.000,00	500	724.567.800,00	600	739.059.156,00	600	753.840.339,12	600	768.917.145,90		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				43.495.000,00		44.638.918,50		45.531.696,87		46.442.330,81		47.371.177,42		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	43.495.000,00	2	44.638.918,50	2	45.531.696,87	2	46.442.330,81	2	47.371.177,42		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				455.895.000,00		587.029.038,50		592.423.619,27		602.572.091,65		548.029.211,17		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20	455.895.000,00	20	587.029.038,50	20	592.423.619,27	20	602.572.091,65	20	548.029.211,17		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	100		100		100		100		100			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	1		5		0		5		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		1		0		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		2			
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		0,00		200.000.000,00		0,00		139.751.677,69		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	139.751.677,69		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000,00		202.300.000,00		0,00		202.300.000,00		0,00		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	1	30.000.000,00	5	202.300.000,00	0	0,00	5	202.300.000,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				38.795.000,00		39.815.308,50		40.611.614,67		41.423.846,96		42.252.323,90		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	100	38.795.000,00	100	39.815.308,50	100	40.611.614,67	100	41.423.846,96	100	42.252.323,90		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				267.100.000,00		274.124.730,00		279.607.224,60		285.199.369,09		290.903.356,47		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20	267.100.000,00	20	274.124.730,00	20	279.607.224,60	20	285.199.369,09	20	290.903.356,47		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3	30.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.400.000,00	3	20.808.000,00	3	21.224.160,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		20.000.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	30.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.400.000,00	2	20.808.000,00	2	21.224.160,00		
5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.789.000,00		31.404.780,00		32.032.875,60		32.673.533,11		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	30.000.000,00	1	30.789.000,00	1	31.404.780,00	1	32.032.875,60	2	32.673.533,11		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.870.807.853,00		1.927.624.010,06		1.966.176.490,26		2.005.500.020,07		2.045.610.020,47		
Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	3	1.870.807.853,00	3	1.927.624.010,06	3	1.966.176.490,26	3	2.005.500.020,07	3	2.045.610.020,47		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	36		36		36		36		36			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				674.700.000,00		688.194.000,00		701.957.880,00		715.997.037,60		730.316.978,35		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	3	674.700.000,00	3	688.194.000,00	3	701.957.880,00	3	715.997.037,60	3	730.316.978,35		
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	51.000.000,00	5	52.020.000,00	5	53.060.400,00		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.166.107.853,00		1.189.430.010,06		1.213.218.610,26		1.237.482.982,47		1.262.232.642,12		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	36	1.166.107.853,00	36	1.189.430.010,06	36	1.213.218.610,26	36	1.237.482.982,47	36	1.262.232.642,12		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.165.196.000,00		1.546.699.920,00		1.576.421.918,40		1.607.350.356,77		1.638.897.363,90		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	1.165.196.000,00	3	1.546.699.920,00	3	1.576.421.918,40	3	1.607.350.356,77	3	1.638.897.363,90		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	27	34		34		34		34		34			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	103	110		110		110		120		120			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				530.240.000,00		540.844.800,00		551.661.696,00		562.694.929,92		573.948.828,52		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	27	34	530.240.000,00	34	540.844.800,00	34	551.661.696,00	34	562.694.929,92	34	573.948.828,52		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000,00		200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	5	30.000.000,00	5	200.000.000,00	5	204.000.000,00	5	208.080.000,00	5	212.241.600,00		
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000,00		200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	15	30.000.000,00	15	200.000.000,00	15	204.000.000,00	15	208.080.000,00	15	212.241.600,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				234.956.000,00		239.655.120,00		244.448.222,40		249.337.186,85		254.323.930,58		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	103	110	234.956.000,00	110	239.655.120,00	110	244.448.222,40	120	249.337.186,85	120	254.323.930,58		
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	30.000.000,00	5	30.600.000,00	5	31.212.000,00	5	31.836.240,00	5	32.472.964,80		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000,00		255.000.000,00		260.100.000,00		265.302.000,00		270.608.040,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	250.000.000,00	3	255.000.000,00	3	260.100.000,00	3	265.302.000,00	3	270.608.040,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	51.000.000,00	2	52.020.000,00	2	53.060.400,00		
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.600.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	30.000.000,00	2	30.600.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				273.124.522.851,00		282.201.418.512,00		292.372.972.704,00		304.180.396.430,00		313.770.947.181,00		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	487.240.700,00	100	496.985.514,00	100	506.925.224,00	100	517.063.728,00	100	527.405.003,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				487.240.700,00		496.985.514,00		506.925.224,00		517.063.728,00		527.405.003,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0	1	487.240.700,00	1	496.985.514,00	1	506.925.224,00	1	517.063.728,00	1	527.405.003,00		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	45		45		45		100		100			

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				16.134.900,00		16.457.598,00		16.786.749,96		17.122.484,96		17.464.934,66		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	1	16.134.900,00	1	16.457.598,00	1	16.786.749,96	1	17.122.484,96	1	17.464.934,66		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				14.924.850,00		15.223.347,00		15.527.813,94		15.838.370,22		16.155.137,62		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	1	1	14.924.850,00	1	15.223.347,00	1	15.527.813,94	1	15.838.370,22	1	16.155.137,62		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				16.134.900,00		16.457.598,00		16.786.749,96		17.122.484,96		17.464.934,66		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	16.134.900,00	1	16.457.598,00	1	16.786.749,96	1	17.122.484,96	1	17.464.934,66		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				14.924.850,00		15.223.347,00		15.527.813,94		15.838.370,22		16.155.137,62		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0	1	14.924.850,00	1	15.223.347,00	1	15.527.813,94	1	15.838.370,22	1	16.155.137,62		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				80.000.000,00		81.600.000,00		83.232.000,00		84.896.640,00		86.594.572,80		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	81.600.000,00	1	83.232.000,00	1	84.896.640,00	1	86.594.572,80		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				80.000.000,00		81.600.000,00		83.232.000,00		84.896.640,00		86.594.572,80		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	80.000.000,00	1	81.600.000,00	1	83.232.000,00	1	84.896.640,00	1	86.594.572,80		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				185.121.200,00		188.823.624,00		192.600.096,20		196.452.097,64		200.381.140,04		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	45	185.121.200,00	45	188.823.624,00	45	192.600.096,20	100	196.452.097,64	100	200.381.140,04		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				80.000.000,00		81.600.000,00		83.232.000,00		84.896.640,00		86.594.572,80		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	20	80.000.000,00	20	81.600.000,00	20	83.232.000,00	20	84.896.640,00	20	86.594.572,80		
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	41,77	23,11	490.485.000,00	40,00	501.428.700,00	40,00	512.639.572,00	40,00	520.427.420,00	40,00	604.900.106,00		
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30,53	38,45		38,72		38,90		39,16		39,37			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				490.485.000,00		501.428.700,00		512.639.572,00		520.427.420,00		604.900.106,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	490.485.000,00	2	501.428.700,00	2	512.639.572,00	2	520.427.420,00	2	604.900.106,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		100					
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1					

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				29.005.000,00		29.585.100,00		30.176.802,00		30.780.338,04		31.395.944,80		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	29.005.000,00	2	29.585.100,00	2	30.176.802,00	2	30.780.338,04	2	31.395.944,80		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				29.005.000,00		29.585.100,00		30.176.802,00		30.780.338,04		31.395.944,80		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	29.005.000,00	2	29.585.100,00	2	30.176.802,00	2	30.780.338,04	2	31.395.944,80		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				118.800.000,00		121.176.000,00		123.599.520,00		126.071.510,40		128.592.940,61		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	118.800.000,00	2	121.176.000,00	2	123.599.520,00	2	126.071.510,40	2	128.592.940,61		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				133.675.000,00		136.348.500,00		139.075.470,00		141.856.979,40		144.694.118,99		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	133.675.000,00	2	136.348.500,00	2	139.075.470,00	2	141.856.979,40	2	144.694.118,99		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				90.000.000,00		92.367.000,00		94.805.488,80		95.469.127,22		90.000.000,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0	1	90.000.000,00	1	92.367.000,00	1	94.805.488,80	1	95.469.127,22	1	90.000.000,00		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		92.367.000,00		94.805.489,20		95.469.126,90		178.821.156,80		
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	90.000.000,00	50	92.367.000,00	50	94.805.489,20	50	95.469.126,90	100	178.821.156,80		
meningkatkan tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	58,63	55,00	272.146.797.151,00	56,00	281.203.004.298,00	57,00	291.353.407.908,00	58,00	303.142.905.282,00	59,00	312.638.642.072,00		
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-96,61	-6,00		-5,00		-7,00		-9,00		-10,00			
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				547.078.200,00		654.332.100,00		665.418.742,00		688.261.659,18		700.026.892,36		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	4	547.078.200,00	4	654.332.100,00	4	665.418.742,00	4	688.261.659,18	4	700.026.892,36		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100			

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				131.087.700,00		133.709.454,00		136.383.643,08		139.111.315,94		141.893.542,26		

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2	2	131.087.700,00	2	133.709.454,00	2	136.383.643,08	2	139.111.315,94	2	141.893.542,26		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				100.382.000,00		102.389.640,00		104.437.432,80		106.526.181,46		108.656.705,09		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	100.382.000,00	1	102.389.640,00	1	104.437.432,80	1	106.526.181,46	1	108.656.705,09		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				215.608.500,00		318.233.006,00		324.597.666,12		342.624.161,78		349.476.645,01		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	215.608.500,00	100	318.233.006,00	100	324.597.666,12	100	342.624.161,78	100	349.476.645,01		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				271.518.948.607,00		280.465.777.593,95		290.602.906.144,41		302.368.965.020,07		311.849.063.904,05		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	122	122	271.518.948.607,00	122	280.465.777.593,95	122	290.602.906.144,41	122	302.368.965.020,07	122	311.849.063.904,05		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	122	122		122		122		122		122			

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	5		20		20		20		20			
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				106.120.800,00		106.120.800,00		106.120.800,00		106.120.800,00		106.120.800,00		
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	8	106.120.800,00	8	106.120.800,00	8	106.120.800,00	8	106.120.800,00	8	106.120.800,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				241.905.262.651,82		246.647.055.568,86		251.581.996.680,23		256.604.102.071,50		261.738.184.112,93		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	122	122	241.905.262.651,82	122	246.647.055.568,86	122	251.581.996.680,23	122	256.604.102.071,50	122	261.738.184.112,93		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5.631.596.955,18		8.642.834.615,09		13.343.626.721,98		19.576.156.967,53		23.400.522.106,46		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	5	5.631.596.955,18	20	8.642.834.615,09	20	13.343.626.721,98	20	19.576.156.967,53	20	23.400.522.106,46		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				23.875.968.200,00		25.069.766.610,00		25.571.161.942,20		26.082.585.181,04		26.604.236.884,66		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	122	122	23.875.968.200,00	122	25.069.766.610,00	122	25.571.161.942,20	122	26.082.585.181,04	122	26.604.236.884,66		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				80.770.344,00		82.894.604,05		85.083.021,59		85.678.602,75		89.551.275,59		
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	6	80.770.344,00	6	82.894.604,05	6	85.083.021,59	6	85.678.602,75	6	89.551.275,59		
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				80.770.344,00		82.894.604,05		85.083.021,59		85.678.602,75		89.551.275,59		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	6	80.770.344,00	6	82.894.604,05	6	85.083.021,59	6	85.678.602,75	6	89.551.275,59		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				562.871.875,00		578.891.208,56		595.406.974,74		612.423.706,08		629.951.272,55		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	20,00	10,00	562.871.875,00	10,00	578.891.208,56	10,00	595.406.974,74	25,00	612.423.706,08	30,00	629.951.272,55	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				562.871.875,00		578.891.208,56		595.406.974,74		612.423.706,08		629.951.272,55		
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	562.871.875,00	1	578.891.208,56	1	595.406.974,74	1	612.423.706,08	1	629.951.272,55		
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	96.930.800	50		50		50		50		50			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				46.691.089,00		47.624.910,78		48.577.409,00		49.548.957,18		50.539.936,32		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	1	46.691.089,00	1	47.624.910,78	1	48.577.409,00	1	49.548.957,18	1	50.539.936,32		
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				41.100.000,00		41.922.000,00		42.760.440,00		43.615.648,80		44.487.961,78		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	1	41.100.000,00	1	41.922.000,00	1	42.760.440,00	1	43.615.648,80	1	44.487.961,78		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				99.008.000,00		100.988.160,00		103.007.923,20		105.068.081,66		107.169.443,30		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	99.008.000,00	1	100.988.160,00	1	103.007.923,20	1	105.068.081,66	1	107.169.443,30		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				126.277.000,00		128.802.540,00		131.378.590,80		134.006.162,62		136.686.285,87		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	50	126.277.000,00	50	128.802.540,00	50	131.378.590,80	50	134.006.162,62	50	136.686.285,87		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				61.604.636,00		65.434.616,78		73.781.251,12		82.465.467,99		96.493.869,69		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	15	15	61.604.636,00	15	65.434.616,78	15	73.781.251,12	15	82.465.467,99	15	96.493.869,69		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				87.371.550,00		89.118.981,00		90.901.360,62		92.719.387,83		94.573.775,59		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	87.371.550,00	1	89.118.981,00	1	90.901.360,62	1	92.719.387,83	1	94.573.775,59		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100.819.600,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	96.930.800	50	100.819.600,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	50	100.000.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari suatu kegiatan yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Sub kegiatan ini merupakan bagian dari program dan kegiatan yang lebih besar, dan digunakan untuk menguraikan secara detail tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki uraian sub kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah. Hal ini termasuk dalam lingkup urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan dan bertujuan untuk mewujudkan tertib perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan sub kegiatan tersebut diarahkan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025 – 2029.

Berikut ini tabel program kegiatan dan subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1.	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKAD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada	

			Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
			5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	

			Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
		5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
		5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
		5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
		5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	

			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
		meningkatkan Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
3.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03.2.01 – Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0003 – Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0004 – Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 – Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 – Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 – Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0012 – Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0013 – Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi, baik itu program maupun kegiatan. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa

efektif suatu program atau kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

1. Mengukur Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
3. Penyusunan Laporan Kinerja Indikator Kinerja Utama menjadi dasar penyusunan laporan kinerja tahunan, yang memberikan gambaran tentang capaian kinerja instansi.
4. Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Utama digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk melihat apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.

Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak bertujuan untuk memberikan gambaran target kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 2025 – 2029 mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Bupati. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tertera dalam tabel 4.6

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 – BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,30	80,50	80,80	81,00	81,50	81,80	82,00	
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	41,77	41,77	23,11	40	40	40	40	
5.	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	38	38	-6	-5	-7	-9	-10	
6.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	58,63	58,63	55	56	57	58	59	
8.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	30,53	30,53	38,00	38,72	38,90	39,16	39,37	
9.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Persentase	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00	30,00	

Target keberhasilan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Ini adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan sejauh mana suatu upaya, program, atau inisiatif dianggap sukses. Target keberhasilan dapat berupa hasil kuantitatif (misalnya, angka, persentase) atau kualitatif (misalnya, deskripsi kondisi yang diinginkan).

Indikator Keberhasilan: Target keberhasilan seringkali diukur melalui indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai pencapaian target.

Target keberhasilan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Ini adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan sejauh mana suatu upaya, program, atau inisiatif dianggap sukses. Target keberhasilan dapat berupa hasil kuantitatif (misalnya, angka, persentase) atau kualitatif (misalnya, deskripsi kondisi yang diinginkan).

Indikator Keberhasilan: Target keberhasilan seringkali diukur melalui indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai pencapaian target. Sedangkan untuk formula perhitungan setiap Indikator Program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	positif	Persentase	30,53	30,53	38,45	38,72	38,90	39,16	39,37	
3.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	positif	Persentase	41,77	41,77	23,11	40,00	40,00	40,00	40,00	
5.	Persentase Penurunan SILPA	negatif	Persentase	-96,61	38,00	-6,00	-5,00	-7,00	-9,00	-10,00	
6.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	positif	Persentase	58,63	58,63	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	
7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	Persentase	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00	30,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupateen Siak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Siak 2025-2029.

Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah dan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan BKAD Kabupaten Siak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh Bidang dan Sekretariat BKAD Kabupaten Siak berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKAD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BKAD Kabupaten Siak berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik- baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, BKAD Kabupaten Siak melalui Bidang dan Sekretariat diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. Renstra BKAD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Siak.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Mendorong Transparansi dan Partisipasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Berintegritas dan Humanis"

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 berjalan secara terarah, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi Renstra ini dilakukan melalui proses:

1. Penjabaran Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan kebutuhan anggaran secara rinci. Renja tahunan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta dokumen pelaksanaan anggaran lainnya. Pelaksanaan Renja di evaluasi secara berkala yaitu setiap triwulan dengan fokus pada capaian indikator baik output maupun outcome serta realiasi anggaran.
2. Pelaporan Kinerja Secara Periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maupun laporan pengawasan internal yang disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian Renstra.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal Januari 2026**

BUPATI SIAK,



AFNI. Z

LAMPIRAN
Table 1 Data Statistik Sektoral Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Disab led	Info Sub Kegiatan
1	5.02.00 0001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		1	1	1	1	2	2	2	2	2		T	[5.02.02.1.01.0001] [5.02.02.2.01.0001]
2	5.02.00 0002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		1	1	1	1	2	2	2	2	2		T	[5.02.02.1.01.0002] [5.02.02.2.01.0002]
3	5.02.00 0003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.01.0003] [5.02.02.2.01.0003]
4	5.02.00 0004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.01.0004] [5.02.02.2.01.0004]
5	5.02.00 0006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.01.0006] [5.02.02.2.01.0006]
6	5.02.00 0007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		1	1	1	1	2	2	2	1	2		T	[5.02.02.1.01.0007] [5.02.02.2.01.0007]
7	5.02.00 0008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen		1	1		1	2	2	2	2	2		T	[5.02.02.1.01.0008] [5.02.02.2.01.0008]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

		Perubahan APBD														
8	5.02.00 0009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.01. 0009] [5.02.02.2.01. 0009]
9	5.02.00 0010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.01. 0010] [5.02.02.2.01. 0010]
10	5.02.00 0011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.01. 0011] [5.02.02.2.01. 0011]
11	5.02.00 0012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.01. 0012] [5.02.02.2.01. 0012]
12	5.02.00 0013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		1	1	1	1	1	1	1	1	1	90	T	[5.02.02.1.01. 0013]
13	5.02.00 0014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02. 0001] [5.02.02.1.02. 0002]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

14	5.02.00 0016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		1	1	1		1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02.0003]
15	5.02.00 0017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		1	1		1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02.0004]
16	5.02.00 0018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02.0005]
17	5.02.00 0019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02.0006]
18	5.02.00 0020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02.0007]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

19	5.02.00 0021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	2	T	[5.02.02.1.02. 0008]
20	5.02.00 0022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	2	T	[5.02.02.1.02. 0009]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

21	5.02.00 0023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	2	T	[5.02.02.1.02.0010]
22	5.02.00 0024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		1	1	1	1	1	1	1	1	90	T	[5.02.02.1.02.0011]
23	5.02.00 0025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.02.0012]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

		Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
24	5.02.00 0026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.03.0001] [5.02.02.2.02.0001]
25	5.02.00 0027	Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.03.0002] [5.02.02.2.02.0002]
26	5.02.00 0028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		1	1		1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.03.0003] [5.02.02.2.02.0003]
27	5.02.00 0029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.03.0004] [5.02.02.2.02.0004]
28	5.02.00 0030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		1	1	1	1	12	1	1	1	12		T	[5.02.02.1.03.0005] [5.02.02.2.02.0005]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

29	5.02.00 0031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.03.0006] [5.02.02.2.02.0006]
30	5.02.00 0032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan		1	1	1	1	6	6	6	3	6	T	[5.02.02.1.03.0007]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

31	5.02.00 0033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen		1	1		1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.03.0008] [5.02.02.2.02.0008]
32	5.02.00 0034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.03.0009] [5.02.02.2.02.0009]
33	5.02.00 0035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.03.0010] [5.02.02.2.02.0010]
34	5.02.00 0036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Orang		100	100	100	100	100	100	50	100	100	T	[5.02.02.1.03.0011] [5.02.02.2.02.0011]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

		Kabupaten/Kota														
35	5.02.00 0037	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan		1	1	1		1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.04.0001] [5.02.02.2.03.0001]
36	5.02.00 0038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		1	1	1		1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.04.0002] [5.02.02.2.03.0002]
37	5.02.00 0039	Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		1	1	1		1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.04.0003] [5.02.02.2.03.0003]
38	5.02.00 0040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		1	1	1		1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.04.0004] [5.02.02.2.03.0004]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

39	5.02.00 0041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen		1	1	1	1	2	2	2	1	2	T	[5.02.02.1.04.0005]
40	5.02.00 0042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.04.0006] [5.02.02.2.03.0006]
41	5.02.00 0043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.04.0007] [5.02.02.2.03.0007]
42	5.02.00 0044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.04.0008] [5.02.02.2.03.0008]
43	5.02.00 0045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.04.0009] [5.02.02.2.03.0009]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

		Akuntansi Pemerintah Daerah														
44	5.02.00 0046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.04.0010] [5.02.02.2.03.0010]
45	5.02.00 0047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang		1	1	1	1	1	1	1	1	45		T	[5.02.02.1.04.0011]
46	5.02.00 0048	BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.04.0012]
47	5.02.00 0049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.05.0001]
48	5.02.00 0050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan		1	1	1	1	8	8	8	1	8		T	[5.02.02.1.05.0002] [5.02.02.2.04.0002]
49	5.02.00 0051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.1.05.0003] [5.02.02.2.04.0003]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

50	5.02.00 0052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.05.0004] [5.02.02.2.04.0004]
51	5.02.00 0053	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	0	T	[5.02.02.1.05.0005] [5.02.02.2.04.0005]
52	5.02.00 0054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	0	T	[5.02.02.1.05.0006] [5.02.02.2.04.0006]
53	5.02.00 0055	Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	0	T	[5.02.02.1.05.0007] [5.02.02.2.04.0007]
54	5.02.00 0056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	2	1	T	[5.02.02.1.05.0008] [5.02.02.2.04.0008]
55	5.02.00 0057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.05.0009] [5.02.02.2.04.0009]
56	5.02.00 0058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.05.0010]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

57	5.02.00 0059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.02.1.06.0001] [5.02.02.2.05.0001]
58	5.02.00 0060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	6	6	1	1	6	T	[5.02.02.1.06.0002] [5.02.02.2.05.0002]
59	5.02.00 0061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		100	100	100	100	100	100	1	1	90	T	[5.02.02.1.06.0003]
60	5.02.00 0062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	0	T	[5.02.03.1.01.0001] [5.02.03.2.01.0001]
61	5.02.00 0063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	0	T	[5.02.03.1.01.0002] [5.02.03.2.01.0002]
62	5.02.00 0064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0003] [5.02.03.2.01.0003]
63	5.02.00 0065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0004] [5.02.03.2.01.0004]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

64	5.02.00 0066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0005] [5.02.03.2.01.0005]
65	5.02.00 0067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0006] [5.02.03.2.01.0006]
66	5.02.00 0068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	500	116	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0007] [5.02.03.2.01.0007]
67	5.02.00 0069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0008] [5.02.03.2.01.0008]
68	5.02.00 0070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0009] [5.02.03.2.01.0009]
69	5.02.00 0071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	10	10	15	15	15	T	[5.02.03.1.01.0010] [5.02.03.2.01.0010]
70	5.02.00 0072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.03.1.01.0011] [5.02.03.2.01.0011]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

		Milik Daerah														
71	5.02.00 0073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		1		1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.03.1.01.0012] [5.02.03.2.01.0012]
72	5.02.00 0074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		1	100	100	100	1	1	50	50	50		T	[5.02.03.1.01.0013] [5.02.03.2.01.0013]
73	5.02.00 0075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.04.1.01.0001] [5.02.04.2.01.0001]
74	5.02.00 0076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	9	9		T	[5.02.04.1.01.0002]
75	5.02.00 0077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	80	1	1	1	1		T	[5.02.04.1.01.0003] [5.02.04.2.01.0003]
76	5.02.00 0078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		1	1	1	1	1	2	4	14	2		T	[5.02.04.1.01.0004] [5.02.04.2.01.0004]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

77	5.02.00 0079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	3	2	12	14	14	T	[5.02.04.1.01.0005]
78	5.02.00 0080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	170	1700 00	12	1	1	T	[5.02.04.1.01.0006] [5.02.04.2.01.0006]
79	5.02.00 0081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1226	1226	1	1	8	T	[5.02.04.1.01.0007] [5.02.04.2.01.0008]
80	5.02.00 0082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.04.1.01.0008]
81	5.02.00 0083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	8	1	1	1	8	T	[5.02.04.1.01.0009]
82	5.02.00 0084	Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		1	1	1	1	1226	1226	8	8	8	T	[5.02.04.1.01.0010]
83	5.02.00 0085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		100	1	100	1	100	100	1	1	1	T	[5.02.04.1.01.0011]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

84	5.02.00 0086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	14	14	12	14	14		T	[5.02.04.1.01.0012]
85	5.02.00 0087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	20		T	[5.02.04.1.01.0013] [5.02.04.2.01.0014]
86	5.02.00 0088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.04.1.01.0014] [5.02.04.2.01.0015]
87	5.02.00 0093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.2.01.0005]
88	5.02.00 0101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		100	1	1	100	1	100	1	1	50		T	[5.02.02.2.01.0013]
89	5.02.00 0117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	2		T	[5.02.02.2.03.0005]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

		Kabupaten/Kota														
90	5.02.00 0123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		1	1	1	1	1	1	1	1	90		T	[5.02.02.2.03.0011]
91	5.02.00 0124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.2.03.0012]
92	5.02.00 0125	Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.2.03.0013]
93	5.02.00 0126	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	0		T	[5.02.02.2.04.0001]
94	5.02.00 0135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	1		T	[5.02.02.2.04.0010]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

95	5.02.00 0138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		100	100	1	100	1	100	1	100	100	T	[5.02.02.2.05.0003]
96	5.02.00 0153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	9	T	[5.02.04.2.01.0002]
97	5.02.00 0156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	1	1	14	T	[5.02.04.2.01.0005]
98	5.02.00 0158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak		1	1	1	1	1	1	1	1	100	T	[5.02.04.2.01.0007]
99	5.02.00 0160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		1	1	1	1	1	1	1	1	9	T	[5.02.04.2.01.0009]
100	5.02.00 0161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.04.2.01.0010]
101	5.02.00 0162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	8	T	[5.02.04.2.01.0011]

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Siak

102	5.02.00 0163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	[5.02.04.2.01. 0012]
103	5.02.00 0164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	T	[5.02.04.2.01. 0013]